

INSTANSI
PROVINSI
SUMBER DANA
TRIWULAN

: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
: SUMATERA SELATAN
: APBD Provinsi Sumatera Selatan
: I

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM

FORM APBD

APBD Provinsi :

- a. Disampaikan Kepala Perangkat Daerah Provinsi kepada :
 - Gubernur Sumatera Selatan cq. Kepala Bappeda Provinsi
- b. Disampaikan Kepala Bappeda Provinsi kepada :
 - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI
 - Menteri Keuangan RI
 - Menteri Dalam Negeri RI

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD DAN APBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum Perangkat Daerah:

1. Tujuan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral (sesuai dengan Perda 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan).

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwasanya visi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terintegrasi dengan visi dan misi Gubernur terpilih yang tercantum dalam dokumen RPJMD. Oleh karena itu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mewujudkan Sumsel Maju Untuk Semua. DESDM Provinsi Sumatera Selatan bertujuan meningkatnya peran sektor energi dan sumber daya mineral secara berkelanjutan.

2. Sasaran

- i. Tercukupinya Kebutuhan Energi Bahan Bakar dan Listrik bagi Masyarakat, yang dapat berlangsung dengan baik jika:
 - (a) terpenuhinya pemanfaatan energi konvensional;
 - (b) meningkatnya Diversifikasi Energi berbasis EBT;
 - (c) meningkatnya akses terhadap pemanfaatan energi listrik
- ii. Meningkatnya pengelolaan pertambangan minerba yang baik dan benar, akan tercapai secara optimal apabila:
 - (a) terpenuhinya kesesuaian WIUP dengan tata ruang wilayah;
 - (b) meningkatnya kepatuhan pemegang izin terhadap kewajiban;
 - (c) meningkatnya kesadaran K3 dan lingkungan pertambangan;
 - (d) meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (PPM)
- iii. Meningkatnya penerimaan sektor ESDM, akan berlangsung dengan maksimal apabila: (a) meningkatnya PNBP (mineral, batubara, migas dan panas bumi); (b) meningkatnya retribusi laboratorium dan pajak air tanah

3. Belanja, Program APBD dan Program APBN :

a) Belanja Perangkat Daerah

No.	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Operasi	28.505.875.250
	a. Belanja Pegawai	16.802.249.000
	b. Belanja Barang Jasa	11.703.626.250

2.	Belanja Modal	752.793.725
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	752.793.725
TOTAL BELANJA		29.258.668.975

b) Program dan Anggaran APBD

No.	Uraian Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	24.987.789.975
2.	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	200.000.000
3.	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	2.025.000.000
4.	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	485.879.000
5.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1.560.000.800
TOTAL ANGGARAN		29.258.668.975

c) Program dan Anggaran APBN;

Pagu Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBN Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.0,-

4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Indikator Kinerja Daerah (RPD)

Sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, Indikator Kinerja yang menjadi tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut:

- a) Jumlah Mineral dan Batubara yang diproduksi
 - Batu Gamping
 - Clay Stone
 - Batubara
- b) Jumlah Pemegang Izin Berusaha di Bidang Mineral dan Batubara (Mineral Bukan Logam dan Batuan)
- c) Persentase PPM dari Perusahaan Tambang untuk Masyarakat sekitar
- d) Kapasitas Daya Listrik Yang Tersedia
- e) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Listrik
- f) Persentase Desa Berlistrik
- g) Persentase Peningkatan Bauran EBT
- h) Jumlah Penerimaan Sektor ESDM (Pendapatan Retribusi di UPTD Geologi dan Laboratorium)
- i) Jumlah Penerimaan Sektor ESDM (Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan)

- j) Jumlah PNPB Sektor Minerba
- k) Persentase Penatausahaan Keuangan dan Perencanaan yang baik
- l) Persentase Pengelolaan Kepegawaian dan SDM yang sesuai aturan

5. Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan kewilayahan (lokasi)

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan tersebar di beberapa lokasi, sebagai berikut:

a) Kota Palembang

Terdapat 6 Kegiatan dan 15 Sub kegiatan yang dilaksanakan di Kota Palembang, antara lain sebagai berikut:

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Peningkatan Pelayanan BLUD
 - Peningkatan dan Penunjang Pelayanan BLUD

b) Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Lahat Terdapat 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Lahat :

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

c) Kabupaten/Kota Se-Sumsel

Terdapat 22 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota Se-Sumsel, sebagai berikut:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
- Penetapan Zona Konservasi Air Tanah dalam Daerah Provinsi
 - Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air tanah pada Cekungan Air Tanah
- Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
 - Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
- Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
 - Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
- Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
 - Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
- Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan usahanya dalam 1 Daerah Provinsi
- Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan

- Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
 - Pengawasan Teknis Kaidah pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
- Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
 - Pengawasan Teknis Kaidah pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
- Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)
 - Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)
 - Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)
- Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan
 - Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan
 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan
- Penatausahaan Sertifikasi Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam Lingkup 1 (satu) Provinsi
 - Pemberian Rekomendasi Teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikasi Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam Lingkup 1 (satu) Provinsi
- Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun
 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun
- Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah Provinsi
 - Penyusunan dan Pemutakhiran data Potensi Biomassa
- Pengelolaan Pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai Bahan Bakar dalam wilayah Provinsi

- Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi Bahan Bakar Biomassa dan Biogas)
- Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah Provinsi
 - Pembinaan dan Pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) dalam daerah
 - Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah
- Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi
- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan pemangku kepentingan ditingkat daerah provinsi
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota
- Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang fasilitas Instalasinya dalam Daerah provinsi
- Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
 - Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
- Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah terpencil dan Perdesaan
 - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
 - Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah terpencil dan Perdesaan

d) Nasional

Terdapat 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yang dilaksanakan secara Nasional dan di Luar Negeri, sebagai berikut:

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBN Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan ini pada SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBD Provinsi Sumatera Selatan :
- a. Realisasi Total belanja

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target s.d. Triwulan ini (%)	Persentase $5=3/2*100\%$
1	2	3	4	5
Belanja Operasi	28.505.875.250	4,136,344,191	15	14,14
a. Belanja Pegawai	16.802.249.000	3,986,344,191	25	21,79
b. Belanja Barang Jasa	11.703.626.250	150.000.000	5	1,28
Belanja Modal	752.793.725	0	0	0
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	752.793.725	0	0	0
TOTAL	29.258.668.975	4,136,344,191	15	14,14

- b. Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. Triwulan ini	Realisasi s.d. Triwulan ini	Target s.d. Triwulan ini	Realisasi s.d. Triwulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	$(5 = 3/2 * 100\%)$	(6)	(7)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	24.987.789.975	4.136.344.191	20	16,55	30	22,11
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	200.000.000	0	20	0	30	0
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	2.025.000.000	0	20	0	30	0
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	485.879.000	0	20	0	30	0
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1.560.000.000	0	20	0	30	11,94
TOTAL	29.258.668.975	4.136.344.191	20	14,14	30	6,81

- c. Indikator Kinerja SKPD Tahun 2025
- Indikator Kinerja SKPD berdasarkan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 :

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah Mineral dan Batubara yang diproduksi	-	-	-	-
	a. Batu Gamping	Ton	3.440.355,51	739.217,53	21,48
	b. Clay Stone	Ton	431.219,40	97.206,53	22,54
	c. Batubara	Ton	141.680.652,53	17.122.315,67	12,09
2	Jumlah Pemegang Izin Berusaha di Bidang Mineral dan Batubara (Mineral Bukan Logam dan Batuan)	Izin	195	203	104,10
3	Persentase PPM dari Perusahaan Tambang untuk Masyarakat sekitar	%	33,30	3,81	11,44
4	Kapasitas Daya Listrik Yang Tersedia	MW	4.209	4.179	99,28
5	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Listrik	%	100	99,99	99,99
6	Persentase Desa Berlistrik	%	100	99,26	99,26
7	Persentase Peningkatan Bauran EBT	%	21,06	21,92	104,08
8	Jumlah Penerimaan Sektor ESDM (Pendapatan Retribusi di UPTD Geologi dan Laboratorium)	Rp Juta	6.000.0000	3.386.880	56,44
9	Jumlah Penerimaan Sektor ESDM (Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan)	Rp Juta	200.000.000	158.810.000	79,40
10	Jumlah PNPB Sektor ESDM	Milyar	964,7	294,98	30,56
11	Persentase Penatausahaan Keuangan dan Perencanaan yang baik	%	100	12,30	12,30
12	Persentase Pengelolaan Kepegawaian dan SDM yang sesuai aturan	%	100	0	0

- d. Penghargaan yang diperoleh Perangkat Daerah
-
- e. Capaian Keberhasilan
- Capaian realisasi keuangan sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 sebesar 14,14 % atau Rp. 4.136.344.191,-.

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

- a) Kendala
- 1. Beberapa kegiatan mengalami pemangkasan anggaran dikarenakan adanya efisiensi anggaran;
 - 2. Terjadi perubahan rencana aliran kas akibat dari penyesuaian anggaran kegiatan;
- b) Tindak Lanjut yang diperlukan.
- 1. Melakukan perubahan rencana pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia;
 - 2. Mengutamakan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas;

IV. PENUTUP

Demikian penjelasan kami mengenai program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 untuk dapat menjadi bahan evaluasi perencanaan kedepan, selanjutnya laporan yang lebih terinci menjadi lampiran pada dokumen ini. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, April 2025

KEPALA DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN



HENDRANSYAH, ST., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA/IVc
NIP. 197212151999031005

INSTANSI
PROVINSI
SUMBER DANA
TRIWULAN

: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
: SUMATERA SELATAN
: APBD Provinsi Sumatera Selatan
: II

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM

FORM APBD

APBD Provinsi :

- a. Disampaikan Kepala Perangkat Daerah Provinsi kepada :
 - Gubernur Sumatera Selatan cq. Kepala Bappeda Provinsi
- b. Disampaikan Kepala Bappeda Provinsi kepada :
 - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI
 - Menteri Keuangan RI
 - Menteri Dalam Negeri RI

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD DAN APBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum Perangkat Daerah:

1. Tujuan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral (sesuai dengan Perda 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan).

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwasanya visi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terintegrasi dengan visi dan misi Gubernur terpilih yang tercantum dalam dokumen RPJMD. Oleh karena itu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mewujudkan Sumsel Maju Untuk Semua. DESDM Provinsi Sumatera Selatan bertujuan meningkatnya peran sektor energi dan sumber daya mineral secara berkelanjutan.

2. Sasaran

- i. Tercukupinya Kebutuhan Energi Bahan Bakar dan Listrik bagi Masyarakat, yang dapat berlangsung dengan baik jika:
 - (a) terpenuhinya pemanfaatan energi konvensional;
 - (b) meningkatnya Diversifikasi Energi berbasis EBT;
 - (c) meningkatnya akses terhadap pemanfaatan energi listrik
- ii. Meningkatnya pengelolaan pertambangan minerba yang baik dan benar, akan tercapai secara optimal apabila:
 - (a) terpenuhinya kesesuaian WIUP dengan tata ruang wilayah;
 - (b) meningkatnya kepatuhan pemegang izin terhadap kewajiban;
 - (c) meningkatnya kesadaran K3 dan lingkungan pertambangan;
 - (d) meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (PPM)
- iii. Meningkatnya penerimaan sektor ESDM, akan berlangsung dengan maksimal apabila: (a) meningkatnya PNBP (mineral, batubara, migas dan panas bumi); (b) meningkatnya retribusi laboratorium dan pajak air tanah

3. Belanja, Program APBD dan Program APBN :

a) Belanja Perangkat Daerah

No.	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Operasi	26.413.692.464
	a. Belanja Pegawai	18.415.319.934
	b. Belanja Barang Jasa	7.998.372.530

2.	Belanja Modal	533.173.000
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	533.173.000
TOTAL BELANJA		26.946.865.464

b) Program dan Anggaran APBD

No.	Uraian Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	24.287.634.984
2.	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	100.418.000
3.	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	1.258.937.200
4.	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	236.473.300
5.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1.063.401.980
TOTAL ANGGARAN		26.946.865.464

c) Program dan Anggaran APBN;

Pagu Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBN Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.0,-

4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Indikator Kinerja Daerah (RPD)

Sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, Indikator Kinerja yang menjadi tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut:

- a) Jumlah Mineral dan Batubara yang diproduksi
 - Batu Gamping
 - Clay Stone
 - Batubara
- b) Jumlah Pemegang Izin Berusaha di Bidang Mineral dan Batubara (Mineral Bukan Logam dan Batuan)
- c) Persentase PPM dari Perusahaan Tambang untuk Masyarakat sekitar
- d) Kapasitas Daya Listrik Yang Tersedia
- e) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Listrik
- f) Persentase Desa Berlistrik
- g) Persentase Peningkatan Bauran EBT
- h) Jumlah Penerimaan Sektor ESDM (Pendapatan Retribusi di UPTD Geologi dan Laboratorium)
- i) Jumlah Penerimaan Sektor ESDM (Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan)

- j) Jumlah PNPB Sektor Minerba
- k) Persentase Penatausahaan Keuangan dan Perencanaan yang baik
- l) Persentase Pengelolaan Kepegawaian dan SDM yang sesuai aturan

5. Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan kewilayahan (lokasi)

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan tersebar di beberapa lokasi, sebagai berikut:

a) Kota Palembang

Terdapat 6 Kegiatan dan 15 Sub kegiatan yang dilaksanakan di Kota Palembang, antara lain sebagai berikut:

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Peningkatan Pelayanan BLUD
 - Peningkatan dan Penunjang Pelayanan BLUD

b) Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Lahat Terdapat 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Lahat :

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

c) Kabupaten/Kota Se-Sumsel

Terdapat 22 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota Se-Sumsel, sebagai berikut:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
- Penetapan Zona Konservasi Air Tanah dalam Daerah Provinsi
 - Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air tanah pada Cekungan Air Tanah
- Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
 - Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
- Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
 - Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
- Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
 - Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
- Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan usahanya dalam 1 Daerah Provinsi
- Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan

- Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
 - Pengawasan Teknis Kaidah pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
- Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
 - Pengawasan Teknis Kaidah pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
- Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)
 - Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)
 - Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)
- Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan
 - Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan
 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan
- Penatausahaan Sertifikasi Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam Lingkup 1 (satu) Provinsi
 - Pemberian Rekomendasi Teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikasi Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam Lingkup 1 (satu) Provinsi
- Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun
 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun
- Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah Provinsi
 - Penyusunan dan Pemutakhiran data Potensi Biomassa

- Pengelolaan Pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai Bahan Bakar dalam wilayah Provinsi
 - Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi Bahan Bakar Biomassa dan Biogas)
- Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah Provinsi
 - Pembinaan dan Pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) dalam daerah
 - Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah
- Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi
- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan pemangku kepentingan ditingkat daerah provinsi
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota
- Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang fasilitas Instalasinya dalam Daerah provinsi
- Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
 - Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
- Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah terpencil dan Perdesaan
 - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
 - Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah terpencil dan Perdesaan

d) Nasional

Terdapat 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yang dilaksanakan secara Nasional dan di Luar Negeri, sebagai berikut:

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBN Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan ini pada SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBD Provinsi Sumatera Selatan :
- a. Realisasi Total belanja

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target s.d. Triwulan ini (%)	Persentase $5=3/2*100\%$
1	2	3	4	5
Belanja Operasi	26.413.692.464	9.765.265.314	45	30,42
a. Belanja Pegawai	18.415.319.934	8.658.267.054	45	47,01
b. Belanja Barang Jasa	7.998.372.530	1.106.998.260	45	13,84
Belanja Modal	533.173.000	349.250.000	45	65,50
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	533.173.000	349.250.000	45	65,50
TOTAL	26.946.865.464	10.114.515.314	45	37,54

- b. Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. Triwulan ini	Realisasi s.d. Triwulan ini	Target s.d. Triwulan ini	Realisasi s.d. Triwulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	$(5 = 3/2 * 100\%)$	(6)	(7)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	24.287.634.984	10.097.589.714	45	16,55	55	54,22
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	100.418.000	0	45	0	45	40
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	1.258.937.200	0	45	0	30	25,56
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	236.473.300	0	45	0	30	22,33
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1.063.401.980	16.925.600	45	1,59	50	47,87
TOTAL	26.946.865.464	10.114.515.314	45	37,54	30	38

- c. Indikator Kinerja SKPD Tahun 2025
- Indikator Kinerja SKPD berdasarkan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 :

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah Mineral dan Batubara yang diproduksi	-	-	-	-
	a. Batu Gamping	Ton	3.440.355,51	1.135.484,46	33,00
	b. Clay Stone	Ton	431.219,40	152.818,16	35,43
	c. Batubara	Ton	141.680.652,53	42.958.950,35	30,32
2	Jumlah Pemegang Izin Berusaha di Bidang Mineral dan Batubara (Mineral Bukan Logam dan Batuan)	Izin	195	220	112,82
3	Persentase PPM dari Perusahaan Tambang untuk Masyarakat sekitar	%	33,30	16	48,04
4	Kapasitas Daya Listrik Yang Tersedia	MW	4.209	3.713	88,21
5	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Listrik	%	100	99,99	99,99
6	Persentase Desa Berlistrik	%	100	99,26	99,26
7	Persentase Peningkatan Bauran EBT	%	21,06	23,12	109,78
8	Jumlah Penerimaan Sektor ESDM (Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan)	Rp Juta	206.000.000	235.967.004	114,55
9	Jumlah PNPB Sektor ESDM	Milyar	964,7	498,49	51,71
10	Persentase Penatausahaan Keuangan dan Perencanaan yang baik	%	100	51,54	51,54
11	Persentase Pengelolaan Kepegawaian dan SDM yang sesuai aturan	%	100	87,14	87,14

- d. Penghargaan yang diperoleh Perangkat Daerah
-
- e. Capaian Keberhasilan
- Capaian realisasi keuangan sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar 37,54 % atau Rp. 10.114.515.314,-.

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

- a) Kendala
- 1. Beberapa kegiatan mengalami pemangkasan anggaran dikarenakan adanya efisiensi anggaran;
 - 2. Terjadi perubahan rencana aliran kas akibat dari penyesuaian anggaran kegiatan;
- b) Tindak Lanjut yang diperlukan.
- 1. Melakukan perubahan rencana pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia;
 - 2. Mengutamakan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas;

IV. PENUTUP

Demikian penjelasan kami mengenai program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 untuk dapat menjadi bahan evaluasi perencanaan kedepan, selanjutnya laporan yang lebih terinci menjadi lampiran pada dokumen ini. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 03 Juli 2025

KEPALA DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN




HENDRIANSYAH, ST., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA/IVc
NIP. 197212151999031005

INSTANSI
PROVINSI
SUMBER DANA
TRIWULAN

: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
: SUMATERA SELATAN
: APBD Provinsi Sumatera Selatan
: III

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM

FORM APBD

APBD Provinsi :

- a.

Disampaikan Kepala Perangkat Daerah Provinsi kepada :

• Gubernur Sumatera Selatan cq. Kepala Bappeda Provinsi
- b.

Disampaikan Kepala Bappeda Provinsi kepada :

• Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI

• Menteri Keuangan RI

• Menteri Dalam Negeri RI

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD DAN APBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum Perangkat Daerah:

1. Tujuan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral (sesuai dengan Perda 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan).

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwasanya visi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terintegrasi dengan visi dan misi Gubernur terpilih yang tercantum dalam dokumen RPJMD. Oleh karena itu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mewujudkan Sumsel Maju Untuk Semua. DESDM Provinsi Sumatera Selatan bertujuan meningkatnya peran sektor energi dan sumber daya mineral secara berkelanjutan.

2. Sasaran

- i. Tercukupinya Kebutuhan Energi Bahan Bakar dan Listrik bagi Masyarakat, yang dapat berlangsung dengan baik jika:
 - (a) terpenuhinya pemanfaatan energi konvensional;
 - (b) meningkatnya Diversifikasi Energi berbasis EBT;
 - (c) meningkatnya akses terhadap pemanfaatan energi listrik
- ii. Meningkatnya pengelolaan pertambangan minerba yang baik dan benar, akan tercapai secara optimal apabila:
 - (a) terpenuhinya kesesuaian WIUP dengan tata ruang wilayah;
 - (b) meningkatnya kepatuhan pemegang izin terhadap kewajiban;
 - (c) meningkatnya kesadaran K3 dan lingkungan pertambangan;
 - (d) meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (PPM)
- iii. Meningkatnya penerimaan sektor ESDM, akan berlangsung dengan maksimal apabila: (a) meningkatnya PNBP (mineral, batubara, migas dan panas bumi); (b) meningkatnya retribusi laboratorium dan pajak air tanah

3. Belanja, Program APBD dan Program APBN :

a) Belanja Perangkat Daerah

No.	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Operasi	26.148.167.258
	a. Belanja Pegawai	18.311.638.000
	b. Belanja Barang Jasa	7.836.529.258

2.	Belanja Modal	595.173.000
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	595.173.000
TOTAL BELANJA		26.743.340.258

b) Program dan Anggaran APBD

No.	Uraian Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	24.613.356.778
2.	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	100.418.000
3.	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	729.690.200
4.	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	236.473.300
5.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1.063.401.980
TOTAL ANGGARAN		26.743.340.258

c) Program dan Anggaran APBN;

Pagu Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBN Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.0,-

4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Indikator Kinerja Daerah (RPD)

Sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, Indikator Kinerja yang menjadi tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut:

- a) Jumlah Mineral dan Batubara yang diproduksi
 - Batu Gamping
 - Clay Stone
 - Batubara
- b) Jumlah Pemegang Izin Berusaha di Bidang Mineral dan Batubara (Mineral Bukan Logam dan Batuan)
- c) Persentase PPM dari Perusahaan Tambang untuk Masyarakat sekitar
- d) Kapasitas Daya Listrik Yang Tersedia
- e) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Listrik
- f) Persentase Desa Berlistrik
- g) Persentase Peningkatan Bauran EBT
- h) Jumlah Penerimaan Sektor ESDM (Pendapatan Retribusi di UPTD Geologi dan Laboratorium)
- i) Jumlah Penerimaan Sektor ESDM (Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan)

- j) Jumlah PNPB Sektor Minerba
- k) Persentase Penatausahaan Keuangan dan Perencanaan yang baik
- l) Persentase Pengelolaan Kepegawaian dan SDM yang sesuai aturan

5. Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan kewilayahan (lokasi)

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan tersebar di beberapa lokasi, sebagai berikut:

a) Kota Palembang

Terdapat 6 Kegiatan dan 15 Sub kegiatan yang dilaksanakan di Kota Palembang, antara lain sebagai berikut:

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Peningkatan Pelayanan BLUD
 - Peningkatan dan Penunjang Pelayanan BLUD

b) Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Lahat Terdapat 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Lahat :

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

c) Kabupaten/Kota Se-Sumsel

Terdapat 22 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota Se-Sumsel, sebagai berikut:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
- Penetapan Zona Konservasi Air Tanah dalam Daerah Provinsi
 - Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air tanah pada Cekungan Air Tanah
- Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
 - Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
- Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
 - Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
- Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
 - Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
- Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan usahanya dalam 1 Daerah Provinsi
- Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan

- Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
 - Pengawasan Teknis Kaidah pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
- Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
 - Pengawasan Teknis Kaidah pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
- Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)
 - Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)
 - Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)
- Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan
 - Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan
 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan
- Penatausahaan Sertifikasi Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam Lingkup 1 (satu) Provinsi
 - Pemberian Rekomendasi Teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikasi Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam Lingkup 1 (satu) Provinsi
- Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun
 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun

- Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah Provinsi
 - Penyusunan dan Pemutakhiran data Potensi Biomassa
- Pengelolaan Pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai Bahan Bakar dalam wilayah Provinsi
 - Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi Bahan Bakar Biomassa dan Biogas)
- Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah Provinsi
 - Pembinaan dan Pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) dalam daerah
 - Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah
- Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi
- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan pemangku kepentingan ditingkat daerah provinsi
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota
- Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang fasilitas Instalasinya dalam Daerah provinsi
- Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
 - Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
- Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah terpencil dan Perdesaan
 - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
 - Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah terpencil dan Perdesaan

- d) Nasional
- Terdapat 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yang dilaksanakan secara Nasional dan di Luar Negeri, sebagai berikut:
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBN Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan ini pada SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBD Provinsi Sumatera Selatan :
- a. Realisasi Total belanja

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target s.d. Triwulan ini (%)	Persentase $5=3/2*100\%$
1	2	3	4	5
Belanja Operasi	26.148.167.258	13.398.422.838	70	51,24
a. Belanja Pegawai	18.311.638.000	11.180.436.781	70	58,75
b. Belanja Barang Jasa	7.836.529.258	2.217.986.057	70	28,30
Belanja Modal	595.173.000	349.250.000	70	42,30
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	595.173.000	349.250.000	70	42,30
TOTAL	26.743.340.258	13.747.672.838	70	51,41

- b. Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. Triwulan ini	Realisasi s.d. Triwulan ini	Target s.d. Triwulan ini	Realisasi s.d. Triwulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	$(5 = 3/2 * 100\%)$	(6)	(7)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	24.613.356.778	13.535.117.088	60	55,73	70	68,59
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	100.418.000	23.684.700	50	23,59	60	55
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	729.690.200	48.311.600	50	5,24	50	40
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	236.473.300	18.918.000	50	8	50	39,17
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1.063.401.980	121.641.450	50	11,44	70	60
TOTAL	26.743340.258	13.747.672.838	52	51,41	60	51,64

- c. Indikator Kinerja SKPD Tahun 2025
- Indikator Kinerja SKPD berdasarkan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 :

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah Mineral dan Batubara yang diproduksi	-	-	-	-
	a. Batu Gamping	Ton	3.440.355,51	1.135.484,46	33,00
	b. Clay Stone	Ton	431.219,40	152.818,16	35,43
	c. Batubara	Ton	141.680.652,53	42.958.950,35	30,32
2	Jumlah Pemegang Izin Berusaha di Bidang Mineral dan Batubara (Mineral Bukan Logam dan Batuan)	Izin	195	220	112,82
3	Persentase PPM dari Perusahaan Tambang untuk Masyarakat sekitar	%	33,30	16	48,04
4	Kapasitas Daya Listrik Yang Tersedia	MW	4.209	3.713	88,21
5	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Listrik	%	100	99,99	99,99
6	Persentase Desa Berlistrik	%	100	99,26	99,26
7	Persentase Peningkatan Bauran EBT	%	21,06	23,12	109,78
8	Jumlah Penerimaan Sektor ESDM (Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan)	Rp Juta	206.000.000	235.967.004	114,55
9	Jumlah PNPB Sektor ESDM	Milyar	964,7	498,49	51,71
10	Persentase Penatausahaan Keuangan dan Perencanaan yang baik	%	100	51,54	51,54
11	Persentase Pengelolaan Kepegawaian dan SDM yang sesuai aturan	%	100	87,14	87,14

- d. Penghargaan yang diperoleh Perangkat Daerah
-
- e. Capaian Keberhasilan
- Capaian realisasi keuangan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025 sebesar 51,41 % atau Rp. 13.747.672.838,-.

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

- a) Kendala
- 1. Beberapa kegiatan mengalami pemangkasan anggaran dikarenakan adanya efisiensi anggaran;
 - 2. Terjadi perubahan rencana aliran kas akibat dari penyesuaian anggaran kegiatan;
- b) Tindak Lanjut yang diperlukan.
- 1. Melakukan perubahan rencana pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia;
 - 2. Mengutamakan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas;

IV. PENUTUP

Demikian penjelasan kami mengenai program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 untuk dapat menjadi bahan evaluasi perencanaan kedepan, selanjutnya laporan yang lebih terinci menjadi lampiran pada dokumen ini. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 15 Agustus 2025

KEPALA DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN




HENDRIANSYAH, ST., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA/IVc
NIP. 197212151999031005

INSTANSI
PROVINSI
SUMBER DANA
TRIWULAN

: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
: SUMATERA SELATAN
: APBD Provinsi Sumatera Selatan
: IV

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM

FORM APBD

APBD Provinsi :

- a. Disampaikan Kepala Perangkat Daerah Provinsi kepada :
 - Gubernur Sumatera Selatan cq. Kepala Bappeda Provinsi
- b. Disampaikan Kepala Bappeda Provinsi kepada :
 - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI
 - Menteri Keuangan RI
 - Menteri Dalam Negeri RI

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD DAN APBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum Perangkat Daerah:

1. Tujuan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral (sesuai dengan Perda 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan).

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwasanya visi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terintegrasi dengan visi dan misi Gubernur terpilih yang tercantum dalam dokumen RPJMD. Oleh karena itu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mewujudkan Sumsel Maju Untuk Semua. DESDM Provinsi Sumatera Selatan bertujuan meningkatnya peran sektor energi dan sumber daya mineral secara berkelanjutan.

2. Sasaran

- i. Tercukupinya Kebutuhan Energi Bahan Bakar dan Listrik bagi Masyarakat, yang dapat berlangsung dengan baik jika:
 - (a) terpenuhinya pemanfaatan energi konvensional;
 - (b) meningkatnya Diversifikasi Energi berbasis EBT;
 - (c) meningkatnya akses terhadap pemanfaatan energi listrik
- ii. Meningkatnya pengelolaan pertambangan minerba yang baik dan benar, akan tercapai secara optimal apabila:
 - (a) terpenuhinya kesesuaian WIUP dengan tata ruang wilayah;
 - (b) meningkatnya kepatuhan pemegang izin terhadap kewajiban;
 - (c) meningkatnya kesadaran K3 dan lingkungan pertambangan;
 - (d) meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (PPM)
- iii. Meningkatnya penerimaan sektor ESDM, akan berlangsung dengan maksimal apabila: (a) meningkatnya PNBP (mineral, batubara, migas dan panas bumi); (b) meningkatnya retribusi laboratorium dan pajak air tanah

3. Belanja, Program APBD dan Program APBN :

a) Belanja Perangkat Daerah

No.	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Operasi	26.148.167.258
	a. Belanja Pegawai	18.311.638.000
	b. Belanja Barang Jasa	7.836.529.258

2.	Belanja Modal	595.173.000
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	595.173.000
TOTAL BELANJA		26.743.340.258

b) Program dan Anggaran APBD

No.	Uraian Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	24.613.356.778
2.	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	100.418.000
3.	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	729.690.200
4.	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	236.473.300
5.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1.063.401.980
TOTAL ANGGARAN		26.743.340.258

c) Program dan Anggaran APBN;

Pagu Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBN Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.0,-

4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Indikator Kinerja Daerah (RPD)

Sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja yang menjadi tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut:

- a) Jumlah Mineral dan Batubara yang diproduksi
 - Batu Gamping
 - Clay Stone
 - Batubara
- b) Jumlah Pemegang Izin Berusaha di Bidang Mineral dan Batubara (Mineral Bukan Logam dan Batuan)
- c) Persentase PPM dari Perusahaan Tambang untuk Masyarakat sekitar
- d) Kapasitas Daya Listrik Yang Tersedia
- e) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Listrik
- f) Persentase Desa Berlistrik
- g) Konsumsi Listrik perkapita
- h) Intensitas Energi Primer
- i) Persentase Peningkatan Bauran EBT

- j) Jumlah Penerimaan Sektor ESDM (Pendapatan Retribusi di UPTD Geologi dan Laboratorium)
 - k) Jumlah Penerimaan Sektor ESDM (Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan)
 - l) Jumlah PNPB Sektor Minerba
 - m) Persentase Penatausahaan Keuangan dan Perencanaan yang baik
 - n) Persentase Pengelolaan Kepegawaian dan SDM yang sesuai aturan
5. Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan kewilayahan (lokasi)
- Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan tersebar di beberapa lokasi, sebagai berikut:
- a) Kota Palembang

Terdapat 6 Kegiatan dan 15 Sub kegiatan yang dilaksanakan di Kota Palembang, antara lain sebagai berikut:

 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Peningkatan Pelayanan BLUD
 - Peningkatan dan Penunjang Pelayanan BLUD
 - b) Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Lahat Terdapat 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Lahat :

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

c) Kabupaten/Kota Se-Sumsel

Terdapat 22 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota Se-Sumsel, sebagai berikut:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
- Penetapan Zona Konservasi Air Tanah dalam Daerah Provinsi
 - Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air tanah pada Cekungan Air Tanah
- Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
 - Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
- Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
 - Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
- Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
 - Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
- Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan usahanya dalam 1 Daerah Provinsi
- Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan

- Pententuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
 - Pengawasan Teknis Kaidah pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
- Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
 - Pengawasan Teknis Kaidah pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
- Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)
 - Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)
 - Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)
- Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan
 - Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan
 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan
- Penatausahaan Sertifikasi Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam Lingkup 1 (satu) Provinsi
 - Pemberian Rekomendasi Teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikasi Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam Lingkup 1 (satu) Provinsi
- Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun
 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun

- Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah Provinsi
 - Penyusunan dan Pemutakhiran data Potensi Biomassa
- Pengelolaan Pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai Bahan Bakar dalam wilayah Provinsi
 - Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi Bahan Bakar Biomassa dan Biogas)
- Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah Provinsi
 - Pembinaan dan Pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) dalam daerah
 - Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah
- Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi
- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan pemangku kepentingan ditingkat daerah provinsi
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota
- Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang fasilitas Instalasinya dalam Daerah provinsi
- Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
 - Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
- Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah terpencil dan Perdesaan
 - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
 - Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah terpencil dan Perdesaan

- d) Nasional
- Terdapat 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yang dilaksanakan secara Nasional dan di Luar Negeri, sebagai berikut:
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBN Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan ini pada SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBD Provinsi Sumatera Selatan :
- a. Realisasi Total belanja

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target s.d. Triwulan ini (%)	Persentase $5=3/2*100\%$
1	2	3	4	5
Belanja Operasi	26.148.167.258	13.398.422.838	100	89,87
a. Belanja Pegawai	18.311.638.000	17.148.109.937	100	93,65
b. Belanja Barang Jasa	7.836.529.258	6.746.833.462	100	86,09
Belanja Modal	595.173.000	579.537.991	100	97,37
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	595.173.000	579.537.991	100	97,73
TOTAL	26.743.340.258	24.474.481.390	100	91,52

- b. Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. Triwulan ini	Realisasi s.d. Triwulan ini	Target s.d. Triwulan ini	Realisasi s.d. Triwulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	$(5 = 3/2 * 100\%)$	(6)	(7)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	24.613.356.778	22.567.513.971	100	91,69	100	100
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	100.418.000	96.745.100	100	96,34	100	100
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	729.690.200	631.723.753	100	90,54	100	100
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	236.473.300	145.736.400	100	61,63	100	83,33
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1.063.401.980	1,032,762,166	100	97,12	100	100
TOTAL	26.743340.258	24.474.481.390	100	96,67	100	91,52

- c. Indikator Kinerja SKPD Tahun 2025
- Indikator Kinerja SKPD berdasarkan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 :

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah Mineral dan Batubara yang diproduksi	-	-	-	-
	a. Batu Gamping	Ton	3.440.355,51	2.830.771,04	82,28
	b. Clay Stone	Ton	431.219,40	378.846,28	87,85
	c. Batubara	Ton	141.680.652,53	108.920.679.01	76,87
2	Jumlah Pemegang Izin Berusaha di Bidang Mineral dan Batubara (Mineral Bukan Logam dan Batuan)	Izin	195	318	163,07
3	Persentase PPM dari Perusahaan Tambang untuk Masyarakat sekitar	%	33,30	40,73	122,3
4	Kapasitas Daya Listrik Yang Tersedia	MW	4.209	3.768	89,52
5	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Listrik	%	100	99,99	99,99
6	Persentase Desa Berlistrik	%	100	99,29	99,29
7	Konsumsi Listrik perkapita	kWh/kapita	926	925,73	99,97
8	Intensitas Energi Primer	SBM/Rp Milyar	197,1	232,38	118,11
9	Rasio Elektrifikasi	%	100	99,99	99,99
10	Porsi EBT dalam bauran Energi Primer	%	21,06	23,15	109,92
11	Jumlah Penerimaan Sektor ESDM (Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan)	Rp Juta	206.000.000	584.281.223	194,76
12	Jumlah PNPB Sektor ESDM	Milyar	964,7	1.357,42	140,70
13	Persentase Penatausahaan Keuangan dan Perencanaan yang baik	%	100	91,52	91,52
14	Persentase Pengelolaan Kepegawaian dan SDM yang sesuai aturan	%	100	100	100

- d. Penghargaan yang diperoleh Perangkat Daerah
-
- e. Capaian Keberhasilan
- Capaian realisasi keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar 91,52 % atau Rp. 24.474.481.390,-.

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

- a) Kendala
1. Belanja pemeliharaan alat water purifier laboratorium air diperoleh dari perubahan DPA pada bulan Oktober 2025, pekerjaan tersebut memerlukan penggantian sparepart alat yang merupakan produk import dan memerlukan indent 2-3 bulan, sehingga dikhawatirkan pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai akhir tahun, sehingga pekerjaan tidak dilaksanakan;
 2. Kendala administrasi dan teknis sehingga belum memungkinkan untuk dilaksanakan (kesiapan pihak k-3 dan waktu pelaksanaan);

b) Tindak Lanjut yang diperlukan.

1. Melakukan perubahan rencana pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia;
2. Mengutamakan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas;

IV. PENUTUP

Demikian penjelasan kami mengenai program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 untuk dapat menjadi bahan evaluasi perencanaan kedepan, selanjutnya laporan yang lebih terinci menjadi lampiran pada dokumen ini. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 13 Januari 2026

KEPALA DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN




HENDRIANSYAH, ST., M.Si.
PEMBA UTAMA MUDA/IVc
NIP. 197212151999031005